BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana desersi dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari yang diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang, sekitar 80% atau delapan puluh tujuh dari keseluruhan kasus sejumlah seratus dua belas kasus, dijatuhi sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sisanya mendapat hukuman pidana kurang dari satu tahun penjara. Sidang yang tidak dihadiri oleh Terdakwa atau *In Absentia* berpeluang besar dijatuhi hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat. Hakim akan menganalisa berbagai alat bukti melalui barang bukti yang umumnya berupa Rekapitulasi Daftar Absensi Prajurit, kemudian memeriksa keterangan saksi, keterangan terdakwa apabila dapat dihadirkan, serta hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat hal yang dapat meringankan atau justru memberatkan terdakwa. Terdakwa yang tidak dapat hadir di persidangan atau belum kembali ke kesatuan dianggap oleh hakim telah lalai dari tanggungjawabnya sebagai militer dan menjadi tolak ukur bagi hakim untuk dianggap secara sah tidak layak menjalani hidup sebagai militer. Terlebih apabila perbuatan terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuannya.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar Prajurit tetap menjunjung tinggi Sapta Marga serta meningkatkan rasa disiplin sebagai seorang militer.
2. Kesatuan atau Pimpinan Militer juga diharapkan dapat lebih memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan para Prajurit dan keluarga Prajurit, serta menyediakan jasa khusus Psikolog Militer di tiap kesatuan untuk menjaga kestabilan mental para Prajurit. Diharapkan kepada tiap Anggota TNI untuk tetap berhati-hati dalam bersikap dan bertindak, karena nama baik kesatuan juga menempel pada tiap pribadi militer.